

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi di dunia internasional. Pada hakekatnya kondisi terakhir dunia lebih banyak ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup*, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Millenium Development Goals (MDG's) merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG's, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, MDG's mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDG's. Oleh karena itu, MDG's menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Upaya percepatan pencapaian Target MDG's menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Banten ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011. MDG's terdiri dari

delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

- 1) *Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;*
- 2) *Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;*
- 3) *Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;*
- 4) *Menurunkan Angka Kematian Anak;*
- 5) *Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;*
- 6) *Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;*
- 7) *Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan*
- 8) *Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.*

Hingga saat ini target-target *MDG's* telah *diarusutamakan* kedalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra dan Renja-SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan *MDG's* tersebut dituangkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015. RAD *MDG's* tersebut disusun dengan maksud dan tujuan agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium.

4.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan

pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional.
- 2) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian.
- 3) Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan.
- 5) Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital.
- 6) Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali.
- 7) Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.
- 8) Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 9) Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya .
- 10) Tingginya kasus tindak pidana korupsi.
- 11) Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta.
- 12) Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
- 13) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

4.2.2 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Rasio pembinaan dan penataan perumahan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 23%.
- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Jumlah bantuan untuk korban bencana pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 29.050 orang (80%);
 - b. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 8.100 KK (70%);
 - c. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan perlindungan dan bimbingan balai perlindungan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 1.812 orang (70%);
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)
 - a. Porsentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan mutu airnya pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%;
 - b. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%.

- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
 - a. Porsentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (dalam dan luar provinsi) pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
 - a. Pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja diharapkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,17%;
 - b. Produktivitas, perluasan, kesempatan kerja dan berusaha dilaksanakan dengan Pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas ketenaga kerjaan guna meningkatnya keterampilan dan kesempatan tenaga kerja pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 688 orang (9,5%).
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
 - a. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013-2017 ditargetkan mencapai 200 Ton tiap tahunnya (60%);
 - b. Jumlah cadangan pangan masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 807 Ton (60%);
 - c. Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 52 Kecamatan (60%).
- 7) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
 - a. Rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan melalui peningkatan fasilitas perhubungan melalui

penyediaan saran dan prasana lalu lintas angkutan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%;

b. Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat, laut dan udara pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

8) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)

a. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Kesenian tidak dicantumkan dalam indikator kinerja program, melainkan akan dituangkan kedalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk target tahunan capaian SPM masing-masing bidang di atas dapat dilihat dalam Tabel 8.1.

4.2.3 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Banten ditetapkan sebagai wilayah yang menempati Koridor 11, yakni Jawa, Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini memiliki potensi dan prospek yang luar biasa bagi Banten yang harus dicapai di masa mendatang sesuai dengan target MP3EI hingga 2025.

Salah satu peran penting yang ditumpukan ke Banten adalah sebagai wilayah utama yang akan menyatukan antara Koridor II (Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya) dan Koridor I Sumatera (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang).

Sebagai wilayah penghubung antara koridor II dengan Koridor I, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dijadwalkan akan dimulai pada Tahun 2014 akan sangat strategis dan dibutuhkan. JSS yang diharapkan menjadi ikon Indonesia, akan

menyatukan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menimbulkan dampak ekonomi signifikan terhadap seluruh wilayah Banten.

Posisi geo-strategis Banten dalam Koridor II MP3EI memiliki keunggulan kompetitif. Koridor II dalam MP3EI tersebut, berkonsentrasi pada pendorong industri dan jasa nasional. Koridor II juga akan dijadikan pusat industri tekstil, makanan-minuman, alat transportasi, perlengkapan pertahanan, perkapalan, dan proyek Metropolitan Jakarta Area.

Selain menjadi penyokong pangan nasional, koridor II juga menjadi pusat industri. Hal ini dimulai dengan pembangunan pabrik baja terpadu yang telah dilaporkan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah kepada presiden saat peluncuran MP3EI. Selain menyerap ribuan tenaga kerja, proyek ini juga menimbulkan *multiplier effect* yang sangat besar. Proyek ini akan membuka peluang bagi Banten untuk segera menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan.

Proyek yang dijadwalkan akan selesai pada 2013 ini, akan menghasilkan baja dengan kapasitas 6 juta ton per tahun atau 2 kali lipat dari kapasitas produksi PT KS (Krakatau Steel) saat ini. Pabrik patungan ini dibangun di sekitar lokasi pabrik PT KS di areal seluas 400 hektar, dengan konsentrasi produksi berupa slab, plate dan hot rolled untuk memenuhi kekurangan permintaan pasar domestik.

Ground breaking proyek ini pada Mei 2010 dan diharapkan sudah dapat beroperasi mulai 2013 dengan kapasitas awal 2,5 juta ton/tahun. Kemudian, proyek ini akan dilanjutkan sampai 2017 hingga mencapai kapasitas 6 juta ton/tahun. Hal ini dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitar, seperti pengembangan industri hilir, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata serta infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasi perusahaan *joint venture*.

Mengingat potensi, prospek, dan perkembangan Banten akhir-akhir ini, maka program MP3EI yang menetapkan Banten di Koridor II optimis bisa dicapai sesuai rencana. Tentunya, prasyarat utama

serta faktor pendukung seperti JSS, peningkatan etos kerja, pembangunan yang berkelanjutan dan lain-lain perlu diteruskan. Iklim investasi di Banten yang sejauh ini sudah kondusif juga perlu ditingkatkan sehingga pembangunan lebih integral dan holistik.

4.3 ISU STRATEGIS DAERAH

4.3.1 Kesenjangan Wilayah

Propinsi Banten memiliki permasalahan kesenjangan kewilayahan antara Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan. Wilayah Utara terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon, sedangkan Wilayah Selatan terdiri dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Wilayah Utara merupakan wilayah yang mempunyai sektor unggulan yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa. Perkembangan sektor industri ini berkembang karena didukung oleh jaringan Jalan Tol Jakarta–Merak. Perkembangan ini ditunjukkan dari adanya industri-industri di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Peranan sektor industri ini terhadap perkembangan Wilayah Utara berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Utara. Sedangkan potensi yang dimiliki Wilayah Selatan adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang belum dikelola dengan baik serta sebagian besar merupakan kawasan lindung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah di Propinsi Banten antara lain kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dimana wilayah Utara relative lebih baik daripada Selatan.

Khususnya wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih menyandang status daerah tertinggal sesuai Keputusan Menteri Negara PDT Nomor 001/Kep/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dimana terdapat 289 desa tertinggal yang tersebar pada:

- 1) Kabupaten Pandeglang terdapat 141 desa tertinggal dari 335 desa/kelurahan, di 12 kecamatan dari 35 kecamatan,
- 2) Kabupaten Lebak terdapat di 148 desa tertinggal dari 345 desa/kelurahan, di 28 kecamatan.

Berdasarkan data desa tertinggal tersebut, maka ditargetkan pada Tahun 2017 tidak ada lagi status desa tertinggal di Banten.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah, Pemerintah telah menetapkan rencana pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Banten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, yaitu :

- 1) Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dan Kawasan Strategis Taman Nasional Ujung Kulon;
- 2) Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur di wilayah Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sedangkan rencana pengembangan kawasan strategis provinsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 meliputi:

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah;
 - a. Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar;
 - b. Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang;
 - c. Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kabupaten Serang;
 - d. Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
 - e. Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon; dan
 - f. Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi;
 - a. Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang
 - b. Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon;

- c. Banten Water Front City di Kota Serang;
- d. Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang;
- e. Kawasan Sport City di Kota Serang;
- f. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota Serang;
- g. Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;
- h. Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
- i. Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
- j. Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- k. Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang;
- l. Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak;
- m. Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda;
- n. Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan.

Selain menetapkan rencana Kawasan Strategis, Pemerintah Provinsi Banten juga mengembangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang meliputi:

- 1) Kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata);
 - a. Kabupaten Tangerang;
 - b. Kabupaten Serang;
 - c. Kabupaten Lebak;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. kawasan agropolitan lainnya yang disepakati bersama.
- 2) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - a. Kabupaten Tangerang,
 - b. Kabupaten Serang,
 - c. Kabupaten Pandeglang,
 - d. Kabupaten Lebak

- e. Kota Cilegon.
 - f. Kota Serang.
- 3) Kawasan pengembangan minapolitan terpadu (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata):
- a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kabupaten Lebak;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. Kota Serang.
 - f. kawasan minapolitan lainnya yang disepakati bersama.
- 4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya
- a. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;
 - b. Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak.
 - c. Kawasan Masyarakat Adat lainnya yang disepakati bersama.
- 5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- a. PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon;
 - b. PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang;
 - c. PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang;
 - d. PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten;
 - e. PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten;
 - f. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
 - g. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;
 - h. Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;
 - i. Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;
 - j. Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
 - k. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
 - l. Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang;

- m. Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
 - n. Waduk Krenceng di Kota Cilegon;
 - o. Puspiptek di Kota Tangerang Selatan.
- 6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - b. Kawasan strategis provinsi meliputi:
 - 1) Cagar Alam Rawa Danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang;
 - 2) Cagar Alam Gunung Tukung Gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang;
 - 3) kawasan AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
 - 4) kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Selanjutnya dalam rangka sinergitas pembangunan antar wilayah dilakukan kerjasama pembangunan antar daerah yang merupakan salah satu unsur perekat hubungan antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kerjasama pembangunan antar daerah
 - a. Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan (Musrenbangtas) Banten-Jawa Barat;
 - b. Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan (Rakortas) Banten-Lampung;
 - c. Kerjasama pembangunan antar daerah Jabodetabekjur;
 - d. Kerjasama pembangunan antar daerah Mitra Praja Utama (MPU).
- 2) Kerjasama pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Banten mencakup kawasan perkotaan, kawasan andalan dan kawasan strategis.

- 3) Kerjasama pembangunan strategis di Provinsi Banten dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta.
 - a. Bandara Banten Selatan, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang;
 - b. WTP Bendungan Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
 - c. Penyediaan Air Bersih Bendungan Karian pada Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja dan Kecamatan Rangkasbitung;
 - d. Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang;
 - e. Rencana Jalan Tol Serang-Panimbang;
 - f. Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda.

4.3.2 Isu Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1) Kabupaten Serang

- a. Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara;
- b. Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang;
- d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;
- e. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa;
- f. Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda;
- g. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang, Kragilan dan Ciwandan;

- h. Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
- i. Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
- j. Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung;
- k. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

2) Kabupaten Pandeglang

- a. Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang;
- b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang;
- c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang;
- d. Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan;
- e. Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sumur dan Panimbang;
- g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi;
- h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung Asepun-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air;

- i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
- j. Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
- k. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

3) Kabupaten Lebak

- a. Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;
- b. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
- c. Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan Cibinuangan;
- d. Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong;
- e. Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- f. Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;
- g. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;

- h. Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air;
- i. Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok-Bogor-Lebak-Pelabuhan Ratu Sukabumi;
- j. Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- k. Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;.
- l. Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
- m. Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya;
- n. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

4) Kabupaten Tangerang

- a. Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis Tangerang Internasional City;
- b. Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- c. Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten masih relatif rendah;
- d. Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- e. Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai;
- f. Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi;
- g. Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;

- h. Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase;
- i. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo.

5) Kota Serang

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Banten Water Front City sebagai wajah Ibukota Provinsi Banten menghadap kelaut;
- b. Percepatan pembangunan Bendungan Sindangheula untuk penyediaan air baku bagi Kawasan Industri Serang-Cilegondan permukiman penduduk;
- c. Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tinggi dan Kawasan Sport City;
- d. Pelestarian Situs Benda Purbakala dan Masjid Banten Lama;
- e. Revitalisasi Terminal Tipe A Pakupatan, Terminal Angkutan Kota Cipocok dan Kepandean;
- f. Revitalisasi penataan Geometri perempatan jalan perkotaan untuk mengatasi kemacetan;
- g. Revitaliasi penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Serang sebagai pusat kegiatan rekreasi dan olahraga masyarakat;
- h. Revitaliasi Drainase kota Serang untuk menangani banjir perkotaan;
- i. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
- j. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kasemen.

6) Kota Cilegon

- a. Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak;
- b. Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
- c. Penanganan banjir perkotaan akibat luapan Sungai Cijalupang;
- d. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
- e. Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-Cilegon (Seragon);
- g. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon.

7) Kota Tangerang

- a. Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
- c. Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Dadap, Sungai Mookervat;

- d. Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang;
- e. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- f. Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;
- g. Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing.

8) Kota Tangerang Selatan

- a. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-Parung;
- b. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gaplek-Sawangan;
- c. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
- d. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
- e. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;
- f. Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta;
- g. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Setu;
- h. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- i. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
- j. Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal;
- k. Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional.

4.4 ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

Berdasarkan isu-isu yang dijelaskan sebagaimana di atas, selanjutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang (2012-2017), maka ditetapkan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 meliputi infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

4.4.1 Infrastruktur Wilayah/Kawasan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berdampak selain pada tingkat kualitas pelayanan dasar juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan provinsi Banten saat ini dalam kondisi baik walaupun di beberapa tempat terdapat kerusakan ringan. Penanganan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan terutama dalam menunjang percepatan pembangunan wilayah dan kawasan strategis pada koridor ekonomi Jawa-Sumatera (MP3EI). Sehingga untuk mengatasi pemerataan pembangunan antar daerah, pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pada 5 tahun mendatang.

Penataan sistem transportasi wilayah terutama di perkotaan saat ini sangat diperlukan guna mengatasi kepadatan, kemacetan, keamanan dan keselamatan transportasi yang didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi massal yang handal. Menghadapi pertumbuhan pergerakan orang, barang dan jasa yang pesat dalam setiap tahunnya, maka selain upaya revitalisasi jaringan dan pembangunan simpul terpadu antar moda (terminal, stasiun KA, pelabuhan dan bandar udara) juga perlu didukung usaha kerja sama investasi melalui sinergitas program pembangunan pusat dan daerah. Pada dimensi lain penataan dan pengendalian sistem informasi-komunikasi termasuk pos dan telekomunikasi tetap ditingkatkan guna membangun kualitas

masyarakat di perkotaan dan pedesaan agar siap menghadapi tantangan informasi global.

Percepatan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Pembinaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi serta perusahaan pertambangan mineral, panas bumi dan air tanah perlu memperhatikan aspek geologi dan mitigasi bencana. Saat ini ratio elektrifikasi listrik sudah sebesar 78,93% namun kebutuhan energi listrik untuk kawasan industri, pariwisata dan infrastruktur transportasi perkotaan masih perlu dipenuhi untuk kurun waktu mendatang. Penyediaan listrik pedesaan khususnya pada kawasan sentra produksi dan kawasan tertinggal tetap menjadi perhatian utama. Pemanfaatan energi terbarukan juga sangat dibutuhkan terutama pada kawasan pedesaan terisolir yang belum terjangkau jaringan listrik.

Saat ini masalah lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara dan tanah telah dikelola dengan baik. Namun pada masa mendatang, tantangan kinerja kualitas pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting khususnya menghadapi perubahan iklim. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Penanganan masalah persampahan dan sanitasi terutama di perkotaan harus dikelola secara terintegrasi dan terpadu antar wilayah. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional menjadi prioritas dan perlu diusahakan melalui kerja sama pembangunan antar daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian khusus dalam periode mendatang. Saat ini kondisi rumah tidak layak huni masih banyak. Pembangunan Perumahan dan Permukiman tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota tetapi juga seluruh stakeholder di daerah

termasuk pemerintah Provinsi. Searah dengan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perumahan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan maka peningkatan kualitas perumahan dan infrastruktur lingkungan melalui pembangunan jalan lingkungan dan jembatan, penyediaan air bersih, perbaikan drainase dan sanitasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan pada sinergitas pusat dan daerah di kawasan pusat pertumbuhan (agropolitan, minapolitan, pariwisata, sentra produksi) dan kawasan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan peningkatan kualitas perumahan dilaksanakan melalui penataan rumah dan pembinaan swadaya masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menyewa, memiliki, memperbaiki dan membangun rumah layak huni.

Kebutuhan air baku baik untuk industri, pertanian dan rumah tangga perlu mendapat perhatian khususnya air minum/air bersih pada daerah rawan air seperti pantura. Disisi lain pembangunan rehabilitasi sungai dan pantai tetap terus dikerjakan untuk mengatasi banjir dan kekeringan. Perhatian pembangunan tidak saja pada wilayah sungai Cidurian, Ciujung dan Cisadane di Utara Banten (Serang dan Tangerang) tetapi juga pada wilayah sungai di Selatan Banten (Lebak dan Pandeglang). Seiring dengan upaya konservasi hulu-hilir sumber air (mata air, situ, waduk) dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) maka pembangunan bendungan (Karian, Sindang Heula) dan tandon air menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan air tersebut.

4.4.2 Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ketahun. Pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan

kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Berdasarkan analisis Indeks Komposit Gabungan dari keempat dimensi kerawanan pangan, menunjukkan kondisi yang relatif seragam, dalam arti seluruh kabupaten dan kota berada pada satu katagori agak tahan.

Pada demensi ketersediaan pangan yang dicerminkan dari rasio normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan pangan, Kabupaten Pandeglang (nilai rasio 0,322) dan Kabupaten Lebak (nilai rasio 0,409) memiliki kondisi sangat tahan, Kabupaten Serang (nilai rasio 0,538) dengan kondisi cukup tahan, kondisi agak rawan ditempati oleh Kabupaten Tangerang (nilai rasio 34,9), Kota Serang (nilai rasio 1,22), Kota Cilegon (nilai rasio 4,095) dan Kota Tangerang Selatan (nilai rasio 2,037).

Hasil analisis dimensi akses pangan dan mata pencaharian dengan beberapa indikator (persentase penduduk miskin, persentase desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan akses listrik) menunjukkan hasil yang lebih baik, tidak terdapat kabupaten dan kota yang berada pada kondisi sangat rawan, cukup rawan dan agak rawan. Kondisi terbaik sangat tahan ditempati oleh Kota Tangerang (nilai komposit 5,67), cukup tahan ditempati oleh 5 kabupaten dan kota lainnya (nilai komposit 5), kondisi agak tahan ditempati oleh Kabupaten Lebak (nilai komposit 4,0) dan Kabupaten Pandeglang (nilai komposit 3,67).

Pada dimensi kerentanan pangan yang dicerminkan oleh indikator persentase daerah berhutan, areal tanaman padi yang mengalami puso dan areal lahan yang terdegradasi, memberikan gambaran yang relatif tidak terlalu bervariasi, kondisi agak tahan terjadi di Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang (nilai indeks komposit 4,33), Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (nilai komposit 4,00), Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan (nilai komposit 3,67), sedangkan Kota Tangerang menyandang kondisi agak rawan dengan nilai indeks komposit 3,33.

Dimensi penyerapan pangan atau pemanfaatan pangan, dibangun oleh lima indikator (berat badan balita dibawah standart, angka kematian bayi, akses penduduk pada air bersih, persentase penduduk yang dilayani Puskesmas, dan rasio jumlah dokter terhadap kepadatan penduduk), Kota Tangerang Selatan (indeks komposit 4,8) memiliki kondisi cukup tahan, sementara agak tahan terdapat di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (indeks komposit 4,4), Kota Serang, Kota Cilegon (indeks komposit 3,4), kondisi agak rawan dengan nilai komposit 3, terdapat di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Permasalahan yang muncul dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat diantaranya rendahnya kualitas ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan, belum optimalnya produktivitas dan sistem distribusi stok bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok dan masih kurangnya stok pangan dimasyarakat.

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan diperdesaan pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, daging sapi, jagung kedelai, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi. Sedangkan tantangan kedepannya adalah diperkirakan konsumsi pangan masyarakat meningkat dan berkurangnya faktor produksi pertanian serta produktivitas lahan yang terus menurun.

4.4.3 Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Banten pada maret 2011 sebesar 690.874 jiwa atau sebesar 6,32% dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2010 yang berjumlah 751.000 atau sebesar (7,02%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 60.126 orang. Tingkat kemiskinan terbesar terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, masing-masing sebesar 11,14% dan 10,38%. Mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang

mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi pada penduduk yang bekerja di sector informal seperti pertanian. Dari sisi keekonomian ketenagakerjaan pada sector pertanian terdapat 42,77% tenaga kerja setengah pengangguran yang artinya nilai produktifitas dan pendapatan yang sangat rendah karena jam kerja dibawah normal.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) didaerah pedesaan sedikit lebih tinggi dari pada perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan didaerah pedesaan lebih buruk dari daerah perkotaan. Terbukti dengan semakin jauhnya jarak pendapatan penduduk miskin di perdesaan terhadap garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di kota.

Secara umum masyarakat miskin perdesaan di Provinsi Banten dihadapkan dengan masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya kepemilikan lahan, rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. Masyarakat miskin dipedesaan sebagian besar bekerja sebagai petani gurem dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 ha dan sebagai buruh tani.

Masyarakat miskin perkotaan pada umumnya bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal dipermukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran. Jumlah masyarakat miskin di perkotaan memiliki kecenderungan untuk bertambah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh urbanisasi yang diakibatkan tekanan ekonomi di wilayah perdesaan.

Masyarakat miskin di kawasan pesisir pada umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung dengan alam (musim) dan rentan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan pesisir. Masyarakat miskin di wilayah pesisir adalah rumah tangga perikanan laut yang bekerja sebagai nelayan kecil,

buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena hanya memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil.

Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan pangan yang tidak tercukupi yang menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi, daya beli yang rendah.

Secara prosentase tingkat pengangguran terbuka tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,28%, dimana jumlah pengangguran terbuka menurun sebesar 49.436 orang. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota Cilegon sebesar 16,4%.

Memperhatikan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat tidak hanya berdasarkan pertambahan penduduk alamiah saja tetapi arus urbanisasi usia angkatan kerja menambah beban dalam penyediaan lapangan pekerjaan di provinsi Banten.

Selain dihadapkan pada masalah pengangguran, Pemerintah Provinsi Banten juga dihadapkan pada permasalahan setengah pengangguran, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu. Hal ini menyebabkan produktivitasnya rendah dan upah yang diterima pun rendah. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka akan semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan pekerja pun rendah dan tidak ada jaminan social atas pekerja. Hal ini sering terjadi di sektor informal. Kecenderungan seseorang masuk sebagai setengah pengangguran adalah tingkat kesempatan kerja yang semakin lama semakin kecil yang membuat para pekerja menerima bekerja walaupun berada dibawah jam kerja normal.

Setengah pengangguran menurut lapangan usaha yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 42,77%. Artinya hampir separuh dari tenaga kerja di sektor pertanian kurang produktif. Hal ini memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan kemiskinan, dimana jumlah kemiskinan terbesar pun berada pada sektor pertanian dan di wilayah perdesaan.

Berdasarkan data sampai dengan Agustus 2010, tenaga kerja setengah pengangguran mencapai 982 ribu orang atau mencapai

21,43% dari tenaga kerja penuh. Jika jumlah pengangguran terbuka ditambah dengan jumlah setengah pengangguran, maka total pengangguran nyata sebesar 32,18% dari total angkatan kerja.

Korelasi pengangguran dan kemiskinan sangat kuat. Artinya terjadinya kemiskinan karena lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan sangat terbatas. Tekanan pertumbuhan penduduk, khususnya akibat urbanisasi yang umumnya pada usia kerja menambah tekanan pada penyediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja setengah pengangguran pun demikian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang besar tidak serta merta menciptakan lapangan kerja yang besar sebagaimana 10-20 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi dan persaingan usaha telah menjadikan aktivitas ekonomi yang semakin efisien dan lebih banyak mempergunakan mesin pengganti tenaga kerja manusia, khususnya pada industri manufaktur. Untuk itu dalam penciptaan lapangan kerja perlu kebijakan pembangunan dan investasi yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja padat karya, khususnya pada sektor manufaktur. Sementara untuk pertanian perlu peningkatan aktivitas ekonomi produksi yang mengarah pada peningkatan nilai ekonomis lahan.

4.4.4 Pendidikan dan Kesehatan

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten, perlu pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Banten dilakukan melalui 3 (tiga) pilar pendidikan yaitu pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pilar pertama pemerataan dan peningkatan akses pendidikan mulai dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), dimana indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang ini di Provinsi Banten pada tahun 2010 baru mencapai 20%. PAUD dan TK dimaksudkan untuk menyiapkan dan memaksimalkan potensi perkembangan otak anak pada usia emas atau golden age melalui stimulus yang

terprogram, terbimbing guna menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Disamping pemerataan dan perluasan akses pada jenjang ini juga harus dilaksanakan upaya peningkatan mutu melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu tenaga pendidiknya.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Propinsi Banten secara umum telah tercapai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, hal ini ditandai oleh capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2010 sebesar 98,76%. Dengan demikian program percepatan wajib belajar yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil. Namun demikian tetap harus dilaksanakan upaya pemeliharaan agar target yang telah dicapai tetap dapat berjalan stabil yaitu dengan program rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Dalam upaya mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) perlu dilaksanakan program pendidikan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan sebesar kurang lebih 1,24%. Ditengarai kelompok ini adalah anak-anak yang termarginalkan oleh karena kondisi fisik dan mentalnya atau karena kondisi ekonomi sosialnya. Untuk itu perlu dikembangkan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SD diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan Sekolah Berstandar Nasional (SBN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu dilakukan program percepatan pemerataan, perluasan akses dan peningkatan mutu secara simultan. Jika kita lihat indikator capaian APM SMP/MTS/Paket B di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 78,88%. Dengan demikian masih tersisa target sasaran sekitar 21,22%. Kendala utama pemerataan pendidikan pada jenjang ini adalah karena kurangnya lembaga sekolah dan masalah hambatan biaya pendidikan. Untuk itu pada jenjang ini perlu dilaksanakan ekspansi penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang telah ada, pembangunan Unit Sekolah Baru dan

menghilangkan biaya pendidikan melalui pembebasan biaya sekolah, SPP dan sejenisnya. Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SMP/MTS/Paket B diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, aplikasi pendidikan berbasis TIK, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan SBN dan SBI.

Pengembangan program pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C difokuskan pada pemerataan dan perluasan akses, dan peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Hal ini dilakukan guna menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan sebagian kecil untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jika kita lihat indikator capaian APM SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Banten pada tahun 2010 baru mencapai 49,58. Ini berarti baru setengah dari penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan setingkat pendidikan menengah. Dengan demikian perlu usaha keras dan masif untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang terampil dan unggul guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Kendala utama pemerataan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C adalah terbatasnya lembaga sekolah yang melayani dan masalah biaya pendidikan. Oleh karena itu pengembangan program pemerataan pendidikan pada jenjang ini diarahkan pada penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang telah ada, membangun unit sekolah baru dan meringankan biaya pendidikan dengan pendampingan BOS SMA/SMK/MA/Paket C. Dalam rangka menyiapkan tenaga terampil ditingkat menengah, dilakukan dengan memperbanyak membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan program magang dan praktek kerja industri di dalam maupun diluar negeri. Dengan demikian diharapkan lulusan SMK dapat langsung siap bekerja atau dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Program peningkatan mutu dan daya saing pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C diarahkan pada peningkatan

sarana prasarana pendidikan, aplikasi pendidikan berbasis TIK, program magang, praktek kerja industri, peningkatan mutu tata kelola pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, pengembangan SBN dan SBI.

Untuk melayani pendidikan bagi mereka yang putus sekolah dan mereka yang tidak terjangkau lembaga sekolah jenjang tingkat dasar dan menengah dikembangkan program Pendidikan Non Formal Informal melalui program kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA. Sedangkan untuk menyiapkan keterampilan operasional bagi angkatan kerja dilakukan pembinaan kursus-kursus keahlian dengan standarisasi asosiasi keahlian secara nasional.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan juga dilakukan dengan upaya standarisasi tenaga pendidik. Dari jumlah guru di provinsi Banten sebanyak 88.317 orang, hingga tahun 2011 telah berkualifikasi S1 sebanyak 53.173 orang. Sisa sebanyak 35.144 orang masih dalam proses peningkatan kualifikasi kejenjang S1 baik melalui program pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun mandiri dan diharapkan tuntas pada tahun 2014.

Program pengembangan pilar ketiga peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan dikembangkan melalui aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Sekolah Berbasis Masyarakat (SBM), peningkatan peran Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Aplikasi Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), Pengembangan Infrastruktur Pendidikan Berbasis Website dan TIK, Evaluasi Pendidikan Berstandar Nasional, Kegiatan Lomba-lomba, Olimpiade berjenjang Nasional maupun Internasional, penerapan ISO pada lembaga sekolah dan Standar Pelayanan Minimal.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat Banten yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus

pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama pada pembangunan kesehatan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMN, RPJMD dan MDG's. Ke 3 (tiga) indikator tersebut merupakan indikator utama dari bidang kesehatan untuk pencapaian IPM.

Pada tahun 2010 AKB mencapai 34,2/1.000 Kelahiran Hidup (KH) dan pada tahun 2012 menurun menjadi 28,90/1.000 KH. AKB ini diharapkan terus mengalami penurunan yang pada akhirnya tahun 2014 AKB di Provinsi Banten turun menjadi 27,60/1.000 KH, sementara target yang dicanangkan dalam RPJMN dan MDG,s yaitu 24/1.000 KH. Sementara untuk AKI di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 191,3/100.000 KH dan pada tahun 2012 menurun menjadi 165/100.000 KH. AKI ini diharapkan terus mengalami penurunan, yang pada tahun 2014 dapat turun mencapai 125/100.000 KH sehingga dapat melampaui atau minimal menyamai apa yang ditargetkan dalam RPJMN yang pada tahun 2014 targetnya adalah 118/100.000 KH, sementara dalam MDG,s pada tahun 2015 AKI diharapkan menjadi 102/100.000. Untuk UHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 64,9 tahun dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 66,5 tahun, pada tahun-tahun berikutnya diharapkan terus meningkat dan pada tahun 2014 diharapkan UHH di Provinsi Banten mencapai 67,30 tahun.

Selain indikator utama seperti tersebut diatas, masih banyak indikator-indikator capaian program yang trendnya menunjukkan peningkatan yang ini mencerminkan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) yang pada tahun 2010 baru mencapai 84%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 88%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (PN) yang pada tahun 2010 baru mencapai 85,5%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 88,6%.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Banten yang setinggi-tingginya, telah dirumuskan 3 (tiga) kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten yaitu 1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan, 2) meningkatkan pengembangan kesehatan berbasis masyarakat, 3) meningkatkan pelayanan KIA dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi diantaranya pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan mutu sumberdaya kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.

Program-program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan meningkatkan pengembangan kesehatan berbasis masyarakat adalah promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan, pengembangan lingkungan sehat. Sementara kebijakan meningkatkan pelayanan KIA dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan revitalisasi keluarga berencana.

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk mengendalikan dan mengurangi kejadian penularan penyakit, baik penyakit menular seperti penyakit HIV/AIDS, TBC, Malaria, Hepatitis, DBD, dll maupun penyakit tidak menular seperti penyakit Diabetes Melitus, penyakit Kardiovaskuler dan lain-lain, melalui kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan, peningkatan sarana untuk penanggulangan penularan penyakit, peningkatan sarana imunisasi, penyediaan alat untuk pemeriksaan HIV/AIDS, penyediaan sarana untuk pemberantasan vector penyebar penyakit, dll.

Program perbaikan gizi masyarakat terutama diarahkan untuk peningkatan status gizi pada bayi dan balita dan ibu hamil yang merupakan kelompok khusus. Upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya peningkatan kapasitas petugas dipelayanan kesehatan dalam menangani kejadian-kejadian yang

berhubungan dengan masalah gizi, melaksanakan revitalisasi Posyandu untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal oleh lingkungannya, pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita yang mengalami masalah gizi, peningkatan sarana dan prasarana posyandu.

Peningkatan mutu sumberdaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya meningkatkan kemampuan petugas kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan kesehatan yang ada sehingga semuanya terakreditasi, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kesehatan, pembinaan organisasi profesi kesehatan yang ada di Banten

Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil serta meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan diantaranya pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun Poskestren, revitalisasi Puskesmas, peningkatan Puskesmas non perawatan menjadi Puskesmas perawatan dan Puskesmas Poned, peningkatan kapasitas petugas dipusat-pusat pelayanan kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai buffer, peningkatan perlengkapan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun Poskestren, penempatan tenaga kesehatan (bidan, perawat) hingga ketiap desa terisi oleh tenaga kesehatan. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dan Labkesda seluruh kabupaten/kota sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota serta juga sedang melaksanakan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi Banten baik fisik maupun peralatannya.

Program promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan diarahkan

untuk memberdayakan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan kesehatan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pengembangan desa siaga aktif, penggalakan PHBS, peningkatan promosi kesehatan melalui berbagai media, peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin melalui pengobatan masal bagi Gakin, pemberian Jamkesda, dan lain-lain.

Pengembangan lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, peningkatan penggunaan jamban sehat. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya mengadakan MCK-plus sebagai percontohan di masyarakat, melakukan pembinaan kabupaten/kota sehat, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas air yg digunakan masyarakat.

Untuk program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan revitalisasi keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta revitalisasi keluarga berencana. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya penempatan bidan di tiap desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, revitalisasi Posyandu, peningkatan P4K, peningkatan Puskesmas mampu rawat inap dan mampu Poned, peningkatan desa siaga, program Jampersal dengan sasaran masyarakat miskin dimana proses persalinan dilakukan oleh tenaga medis secara gratis, persalinan harus dengan tenaga Kesehatan, pemeriksaan kehamilan beresiko secara rutin, program PKH oleh Dinas Sosial, program KB untuk pencegahan kehamilan dini, penundaan usia perkawinan, mendekatkan layanan kesehatan dan lain-lain. Dengan program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB yang pada gilirannya dapat meningkatkan UHH.

4.4.5 Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

- 1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah.
- 2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.
- 3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai.
- 4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan.
- 5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat.
- 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.